

**POLITIK ETNIK PASCA KONFLIK MADURA- DAYAK DI KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT KALIMANTAN TENGAH**

**Melly Rahmadan Ningsih**

**Email : [Mellyrhn27@gmail.com](mailto:Mellyrhn27@gmail.com)**

**Dr. Laila Kholid Alfirdaus S.IP., M.PP**

**Email : [alfirdaus\\_laila@yahoo.com](mailto:alfirdaus_laila@yahoo.com)**

**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si**

**Email : [nhsardini@gmail.com](mailto:nhsardini@gmail.com)**

**Departemen Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai politik etnik pasca konflik Madura Dayak di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Penelitian ini menjadi menarik dikarenakan masih minimnya pembahasan mengenai kondisi masyarakat pasca konflik etnik Madura Dayak yang terjadi di kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Namun dikarenakan terdapat banyak penelitian mengenai konflik etnik Madura Dayak yang mengambil latar belakang Sampit, Kotawaringin Timur, Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat demi melihat sudut pandang lain serta dampaknya ke daerah diluar tempat kejadian konflik etnik Madura Dayak yang sering disebut sebagai Konflik Sampit tersebut.

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi. Penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi dikenal sebagai suatu proses penelitian yang melibatkan peneliti secara langsung ke dalam kelompok tertentu. Penelitian kualitatif pendekatan etnografi pada umumnya digunakan untuk meneliti suatu kegiatan, bahasa, cara hidup, dan kepercayaan dalam masyarakat.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang diantaranya adalah kondisi sosial masyarakat Kotawaringin Barat pasca konflik berlangsung baik dan lebih tertata. Masyarakat yang semakin heterogen, serta kemajuan teknologi serta zaman mengakibatkan pergeseran pola pikir yang kian terbuka terhadap pendatang. Alhasil kini suku Dayak bukanlah lagi satu-satunya masyarakat mayoritas, melainkan sudah disaingi jumbelahya dengan masyarakat etnik Melayu, serta etnik Jawa yang kini dapat bermigrasi dengan mudah. Diluar suku mayoritas, Dayak, Melayu, dan Jawa, masyarakat suku Madura sendiri kedudukannya sudah jauh lebih aman. Fakta lapangan menyebutkan bahwa 85% pasar ekonomi dikuasai oleh etnik Madura mulai dari pasar tradisional hingga pertokoan klontong dan suplayer buah dan sayuran. Sementara masyarakat etnik Dayak, Melayu, dan Jawa lebih banyak yang terlibat dengan sektor industri seperti pengusaha sawit dan karet. Khusus untuk bidang birokrasi dan politik, masyarakat etnik Madura cenderung pasif dikarenakan memang minat dan bakat yang diturunkan secara turun temurun adalah kerja lapangan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Oleh karena itu, masyarakat yang lebih aktif dalam bidang birokrasi pemerintah dan politik adalah etnik-etnik selain suku Madura, diantaranya ada Dayak, Jawa, dan Melayu.

**Kata Kunci : Politik Etnik, Integrasi, Ekonomi, Birokrasi Pemerintah.**

**ETHNIC POLITICS POST-MADURA-DAYAK CONFLICT IN KOTAWARINGIN BARAT  
REGENCY, CENTRAL KALIMANTAN**

**Melly Rahmadan Ningsih**

**Email : [Mellyrhn27@gmail.com](mailto:Mellyrhn27@gmail.com)**

**Dr. Laila Kholid Alfirdaus S.IP., M.PP**

**Email : [alfirdaus\\_laila@yahoo.com](mailto:alfirdaus_laila@yahoo.com)**

**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si**

**Email : [nhsardini@gmail.com](mailto:nhsardini@gmail.com)**

**Department of Politic and Government  
Faculty of Social and Political Science  
Diponegoro University Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

***ABSTRACT***

*This study discusses ethnic politics after the Madura Dayak conflict in West Kotawaringin Regency, Central Kalimantan. This research is interesting because there is still a lack of discussion about the condition of the community after the Madurese Dayak ethnic conflict that occurred in the city of Sampit, East Kotawaringin Regency. However, because there are many studies on the Madurese Dayak ethnic conflict that take the background of Sampit, East Kotawaringin, the author decided to conduct research in Pangkalan Bun, West Kotawaringin Regency in order to see another point of view and its impact on areas outside the scene of the Madurese Dayak ethnic conflict which is often referred to as the Sampit Conflict.*

*The research was carried out using qualitative methods and an ethnographic approach. Qualitative research with an ethnographic approach is known as a research process that involves researchers directly into certain groups. Qualitative research with an ethnographic approach is generally used to examine an activity, language, way of life, and beliefs in society.*

*This study resulted in several conclusions, including the social conditions of the people of West Kotawaringin after the conflict went well and were more organized. An increasingly heterogeneous society, as well as technological advances and times have resulted in a shift in mindset that is increasingly open to immigrants. As a result, now the Dayak tribe is no longer the only majority community, but has been rivaled in number with the Malay ethnic community, as well as the Javanese ethnicity who can now migrate easily. Apart from the majority tribes, Dayak, Malay, and Javanese, the Madurese themselves are in a much safer position. Field facts state that 85% of the economic market is controlled by ethnic Madurese, ranging from traditional markets to grocery stores and fruit and vegetable suppliers. Meanwhile, the Dayak, Malay and Javanese ethnic communities are more involved with the industrial sector such as oil palm and rubber entrepreneurs. Especially for the bureaucracy and politics, the Madurese ethnic community tends to be passive because the interests and talents that are passed down from generation to generation are field work related to labor. Therefore, people who are more active in the field of government bureaucracy and politics are ethnic groups other than the Madurese, including Dayak, Javanese, and Malay.*

***Keywords: Ethnic Politics, Integration, Economy, Government Bureaucracy.***

## A. PENDAHULUAN

Politik identitas menjadi menarik jika dikaitkan dengan konflik etnik Dayak Madura yang pernah terjadi 20 tahun silam karena pertikaian tersebut menunjukkan bagaimana politik identitas etnik asli suku setempat memiliki kekuatan yang besar. Jauh sebelum konflik politik etnik yang telah terjadi, sudah terlebih dahulu terjadi konflik sosial yang menjadi sumber dari segala sumber konflik antar etnik Dayak Madura tersebut terjadi. Konflik etnik tersebut berujung mempolitisasi masyarakat setempat untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnikitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Politik etnik merupakan bagian dari politik identitas yang mana merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas berbagai asumsi mengenai politik etnikitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, dan bahasa (Maarif, Syafii, 2012).

Setelah konflik terjadi pada awal tahun 2000 yang lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2001 yang di dalamnya membahas mengenai penanganan masyarakat pasca konflik serta perjanjian antar dua etnik yang berkonflik. Pada pasal 2

ayat 2 tertulis adanya kehendak yang tulus untuk menjunjung tinggi falsafah "*hidup belum bahadat, di mana bumi dipijak, disitu langit dijunjung*". Pasal tersebut menerangkan bahwa masyarakat diharuskan untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi adat istiadat asli dari Kalimantan itu sendiri. Kini kondisi yang harus dihadapi seluruh masyarakat pulau Kalimantan adalah bagaimana menangani segala perubahan yang terjadi setelah berakhirnya konflik tersebut. Perselisihan antar kedua etnik tersebut sesungguhnya masih ada dan seringkali digunakan sebagai salah satu taktik politik berupa propaganda dalam masa kampanye. Keadaan tersebut secara perlahan membentuk sebuah kerenggangan dalam integrasi sosial kehidupan masyarakat setempat. Stereotip yang turun temurun mengenai Dayak Madura telah mengakar dan membudaya sehingga menciptakan hubungan yang cenderung renggang antar kedua suku tersebut, yang bahkan masih terasa selama 20 tahun terakhir pasca konflik tersebut. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan masyarakat (Muin, 2006). Banyak teori mengenai integrasi yang dikemukakan oleh para ilmuan kini digunakan sebagai acuan utama untuk menjelaskan atau menggambarkan proses integrasi yang terjadi pada kelompok - kelompok yang berbeda latar belakang sosial dan budaya. Dalam interaksi antar berbagai kelompok masyarakat, pertemuan

antar kelompok etnik yang berlainan dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti adaptasi, integrasi, konflik sosial dan sebagainya.

Dengan menggunakan pandangan rasionalism serta praktik berbasis bukti berupa hasil observasi, wawancara, serta studi pustaka, Peneliti akan menunjukkan bagaimana keadaan relasi antar etnik, serta bentuk dari integrasi sosial pasca konflik Dayak Madura dengan mengemukakan seni komunikasi etnografi.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana relasi politik etnik pasca konflik Madura Dayak setelah 20 tahun berlalu, serta mengetahui kondisi sosial masyarakat setempat pasca konflik Madura Dayak di Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai salah satu Kabupaten yang mendapatkan dampak atas konflik Dayak Madura tersebut.

## **C. KERANGKA TEORI**

### **1. Integrasi Sosial**

Selama ini kajian tentang integrasi sosial sering dipengaruhi oleh wacana kekuasaan tentang penyatuan dalam sebuah kekuatan identitas untuk mengatasi perbedaan. Interaksi sosial menonjolkan adanya penundukan terhadap kekuatan-kekuatan minoritas untuk tunduk dan menyatu dibawah kuasa identitas golongan mayoritas. Integrasi sosial sebagai upaya membangun kerukunan dapat dilakukan dengan menggunakan teori integrasi sosial (sosial integration). Teori ini

menerangkan bahwa pada dasarnya masyarakat berada dalam sebuah sistem sosial yang mengikat mereka dalam keseimbangan (ekuilibrium). Hal ini tercermin dari dua pengertian dasar integrasi sosial diantaranya, pertama, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu, dan kedua, menyatukan unsur-unsur tertentu dalam suatu masyarakat sehingga tercipta sebuah tertib sosial (Ritzer, 2004). Proses ini ingin mengintegrasikan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat, dengan cara menghubungkan perbedaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor daerah, budaya, agama, kepentingan, kelas sosial dan sebagainya, dengan mengurangi ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.

### **2. Politik Etnik**

Etnikitas adalah salah satu dari pokok bahasan dalam ilmu sosiologi politik yang kini semakin berkembang seiring zaman sehingga menyebabkan berubahnya pola politik identitas di Indonesia. Jika dilihat dari sisi tatanan rezim politik, etnikitas sesungguhnya telah dihilangkan dalam panggung politik agar semua terlihat sama rata. Namun, terlepas dari rezim politik yang cenderung bersifat tertutup, sesungguhnya dalam kadar tertentu politik identitas tetap saja mendapatkan peran baik secara terang-terangan maupun secara tertutup. Seringkali etnik dijadikan dasar legitimasi dalam sosial budaya di beberapa daerah tertentu termasuk

di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang kini menjadi lokasi yang difokuskan dalam pembahasan. Berbeda dengan politik daerah, politik yang berlevel nasional menyatakan bahwa faktor etnik dan agama tidak lagi merupakan isu utama yang berpengaruh dalam kontestasi politik nasional (Mallarangeng,1997), (Liddle&Mudjani, 2007). Menarik fokus kembali pada pokok pembahasan, suku Madura di Kalimantan terlanjur mendapatkan stereotip negatif oleh penduduk asli Kalimantan yaitu suku Dayak, dan begitu pula sebaliknya. Indonesia di kenal mempunyai segenap kelompok etnik yang kasar, agresif, dan kekerasan sejak zaman kolonial (Jonge,1995), (Smith, 2004). Persepsi negatif inipun telah dipercaya secara luas oleh penduduk lokal dan telah mempengaruhi interaksi sehari-hari suku Dayak dengan Madura selama bertahun-tahun.

### 3. *Konflik Etnik*

Etnikitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan sejarah, nenek moyang, asal usul dan bahasa yang tercermin dalam simbol-simbol yang khas, seperti agama, pakaian dan tradisi. Secara singkat, etnikitas didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang secara budaya berbeda dari kelompok masyarakat yang lain. Suatu bangsa dan negara bisa jadi memiliki beragam etnik yang masing-masing memiliki ciri yang khas dan menonjol yang dengan mudah dapat dibedakan dari kelompok etnik yang lain. Kata

etnik pada dasarnya merupakan kategori sosial atau identifikasi sosial. Artinya, etnik adalah konsep yang diciptakan oleh masyarakat berdasarkan ciri khas sosial yang dimiliki sekelompok masyarakat yang membedakannya dengan kelompok masyarakat yang lain. Jadi kategori pengelompokan masyarakat ke dalam suatu etnik tertentu didasarkan pada faktor sosial, bukan faktor yang lain, seperti faktor ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya (Ashmore,Wilder, 2001). Kata etnikitas merujuk kepada ciri-ciri suatu kelompok masyarakat yang biasanya berkaitan dengan ciri-ciri sosiologis dan antropologisnya. Misalnya seperti agama, adat istiadat, bahasa dan budaya serta asal usul nenek moyang yang menjadi asal mula terbentuknya suatu kelompok tertentu.termakan oleh zaman, kini etnik sering dikacaukan dengan kata ras meskipun sudah jelas bahwa kata ras mengacu pada ciri-ciri biologis dan genetik yang membedakan seseorang dari orang lain dalam suatu kelompok masyarakat yang lebih luas.

Konflik dapat didefinisikan sebagai ketidak sesuaian tujuan, keyakinan, sikap dan tingkah laku (Ashmore, Wilder, 2001). Maksudnya adalah, berdasarkan keyakinan suatu etnik yang dibangun berdasarkan budaya etniknya memiliki tujuan etnik secara umum dan tujuan tersebut dicapai dengan rancangan sikap atau tingkah laku anggota etnik. Tujuan ini menjadi cita-cita yang harus dicapai, namun

dalam kenyataannya tujuan tersebut tidak tercapai oleh karena berbagai faktor, bahkan bisa jadi budaya yang diyakini juga terancam karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Kesadaran semua anggotanya terhadap suatu kelompok etnik yang berlebihan dapat memicu munculnya faktor etnosentrisme (ethnocentrism) yang bisa jadi salah satu faktor pemicu konflik etnik. Faktor-faktor yang dapat memicu konflik antar etnik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu paradigma kultural dan paradigma struktural. Paradigma kultural memandang konflik etnik sebagai isu identitas sosial yang disebabkan oleh adanya ancaman terhadap budaya etnik. Paradigma struktural memandang bahwa konflik etnik bukan merupakan isu identitas etnik, melainkan isu yang erat kaitannya dengan masalah ekonomi, masalah politik, termasuk masalah pemukiman. Konflik antar etnik yang bersifat struktural dipicu oleh tiga faktor utama, pertama, perebutan sumberdaya yang langka, seperti perebutan kekuasaan, lapangan kerja, teritorial, ekonomi, pengakuan hak dalam artian yang luas, dll, kedua yaitu modernisasi yang bertentangan dengan budaya etnik, dan yang terakhir adalah penambahan anggota etnik melalui mekanisme non kekerabatan.

#### **4. Masyarakat Pasca Konflik**

Sejarah konflik etnik yang telah terjadi 20 tahun lalu mau tidak mau membawa masyarakat Kalimantan Tengah kepada

kecanggungan sosial serta stereotip yang terkadang menjadi berlebihan. Konflik besar antara Madura dan Dayak tersebut membawakan sebongkah kisah yang masih terperangkap di relung pikiran dan batin, terlebih lagi bagi masyarakat Madura yang pada saat kejadian menjadi target utama yang bahkan harus sampai diungsikan ke luar pulau Kalimantan untuk mengamankan warga yang masih dapat diselamatkan. Setelah hampir 20 tahun berlalu, kini sudah tak ada konflik lagi dan semua hidup berdampingan satu sama lainnya, namun bukan berarti kejadian 20 tahun silam tersebut dapat dilupakan begitu saja. Masyarakat yang majemuk secara tidak langsung telah tercipta pasca tragedi sampit lalu. Masyarakat majemuk (plural societies) adalah suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembaharuan satu dan lainnya dalam suatu kesatuan politik (Suryana, Rusdiana, 2015).

Masyarakat yang memahami kemajemukan akan mempertahankan hubungan yang saling melengkapi satu sama lain, jauh dari prasangka dan keceburuan sosial, hal tersebut jika terus dibina dan dipupuk akan semakin mempererat hubungan. Akan tetapi jika pola hubungan yang dibangun atas keinginan menguasai serta mendominasi maka akan muncul persepsi dan prasangka yang akan menimbulkan kerengangan serta konflik suku, ras dan agama baik pada individu serta kelompok

masyarakat. Hal tersebut timbul di akibatkan oleh sejarah masalah yang pada akhirnya menciptakan stereotip yang membekas pada suku-suku tertentu yang pernah berkonflik sebelumnya.

Kehidupan masyarakat pasca konflik menjadi fokus peneliti pada pembahasan kali ini, bagaimana keberjalanan politik etnik yang kini secara transparan menjadi tolak ukur penilaian baik dalam bercengkrama sehari-hari maupun dalam arena politik. Dampak kerusuhan Sampit ini masih sangat terasa pada awal tahun 2001 hingga 2005. Dikatakan demikian karena sempat beberapa warga Madura yang berhasil ditemukan oleh warga setempat, walaupun telah “menyembunyikan” identitasnya tetap saja diminta kembali untuk keluar dari wilayah Kalimantan Tengah pada saat itu. Pemerintah pun akhirnya turun tangan langsung dengan mengevakuasi warga, dan kemudian terus meningkatkan keamanan, dan menangkap para provokator yang menjadi sumber penyebab konflik. Sebagai penanganan trauma masyarakatnya, antara lain adalah dengan melakukan rehabilitasi mental. Rehabilitasi mental dianggap perlu diterapkan karena dampak dari perang Sampit ini mampu memunculkan trauma yang mendalam, khususnya bagi orang-orang Suku Madura yang kerabatnya menjadi korban pemenggalan dari Suku Dayak, yang tentunya sedikit banyak akan selalu membekas dalam ingatan.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian kualitatif pendekatan etnografi merupakan suatu penelitian yang mempelajari tentang kelompok sosial dan budaya masyarakat secara mendalam sehingga peneliti harus terlibat dan mengikuti keseharian subjek penelitiannya secara langsung. Dalam penelitian etnografi terdapat dua konsep landasan dasar, yaitu aspek bahasan dan budaya. Bahasa merupakan aspek penting di dalam kebudayaan masyarakat. Penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi dikenal sebagai suatu proses penelitian yang melibatkan peneliti secara langsung ke dalam kelompok tertentu. Penelitian kualitatif pendekatan etnografi pada umumnya di gunakan untuk meneliti suatu kegiatan, bahasa, cara hidup, dan kepercayaan dalam masyarakat. Penelitian etnografi merupakan sebuah penelitian kualitatif dimana seorang peneliti menguraikan dan menafsirkan pola bersama dan belajar nilai-nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa dari berbagai kelompok. Baik sebagai proses dan hasil penelitian, etnografi adalah sebuah cara belajar kelompok pada suatu budaya baik sebagai akhir, dalam hasil Penelitian penelitian (Creswell, 2007).

#### **E. HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang diantaranya adalah kondisi sosial masyarakat Kotawaringin Barat

pasca konflik berlangsung baik dan lebih tertata. Masyarakat yang semakin heterogen, serta kemajuan teknologi serta zaman mengakibatkan pergeseran pola pikir yang kian terbuka terhadap pendatang. Alhasil kini suku Dayak bukanlah lagi satu-satunya masyarakat mayoritas, melainkan sudah disaingi jumbahnya dengan masyarakat etnik Melayu, serta etnik Jawa yang kini dapat bermigrasi dengan mudah. Diluar suku mayoritas, Dayak, Melayu, dan Jawa, masyarakat suku Madura sendiri kedudukannya sudah jauh lebih aman. Fakta lapangan menyebutkan bahwa 85% pasar ekonomi dikuasai oleh etnik Madura mulai dari pasar tradisional hingga pertokoan klontong dan suplayer buah dan sayuran. Sementara masyarakat etnik Dayak, Melayu, dan Jawa lebih banyak yang terlibat dengan sektor industri seperti pengusaha sawit dan karet. Khusus untuk bidang birokrasi dan politik, masyarakat etnik Madura cenderung pasif dikarenakan memang minat dan bakat yang diturunkan secara turun temurun adalah kerja lapangan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Oleh karena itu, masyarakat yang lebih aktif dalam bidang birokrasi pemerintah dan politik adalah etnik-etnik selain suku Madura, diantaranya ada Dayak, Jawa, dan Melayu.

Pada hakikatnya konflik merupakan salah satu fenomena yang keberadaannya dibutuhkan sebagai penyeimbang hubungan sosial. Konflik dan integrasi sosial masyarakat adalah hal yang biasa

terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan ciri-ciri fisik, pola pandang, pola pikir, kebiasaan dan adat istiadat yang dibawa setiap individu dalam masyarakat menyebabkan akan timbulnya sebuah interaksi sosial yang tak jarang pula melahirkan sebuah konflik sebagai akibat dari ketidak seimbangan pola pikir masyarakat tersebut. Konflik sesungguhnya tidak selalu berakhir buruk.

Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi, sementara integrasi yang tidak terkontrol akan menghasilkan sebuah konflik didalam masyarakat. Konflik dapat pula menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat, karena timbulnya pertentangan merupakan indikasi telah berjalanya proses akomodasi, maka dengan proses akomodasi tersebut memungkinkan melakukan perubahan-perubahan dalam kaitannya dengan hubungan antara kelompok-kelompok tersebut, dengan demikian diharapkan kembali dapat menciptakan kembali keseimbangan dan menciptakan kerja sama di masyarakat.

Pertentangan-pertentangan atau konflik yang terjadi menyebabkan setiap kelompok untuk melakukan introspeksi dan dilanjutkan dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam kelompok tersebut, dan untuk menutupi kelemahan tersebut dimungkinkan masing-masing kelompok untuk melakukan kerja sama saling melengkapi



kekuarungannya dengan demikian kelemahan-kelemahan dari masing-masing kelompok tersebut dapat tertutupi, selain itu pertentangan atau konflik ini memberikan batas-batas yang jelas terhadap peran dan tanggung jawab kelompok akan fungsi dan kedudukannya di masyarakat. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terhambatnya integrasi sosial masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Konflik atau pertentangan akibat tidak tuntasnya penyelesaian suatu masalah.
2. Persaingan tidak sehat yang melahirkan kontravensi dan mengarah pada pertentangan atau konflik.
3. Prasangka buruk yang dilatar belakangi oleh cemburu sosial.
4. Fanatisme yang berlebihan karena perbedaan: ras, etnik, kebudayaan, agama dan kepercayaan, daerah tempat tinggal, mayoritas, dan minoritas.
5. Pembedaan perlakuan para pemimpin terhadap warga masyarakat, baik secara individual maupun kelompok.
6. Rendahnya sikap toleransi dalam hidup bermasyarakat.
7. Berlangsungnya tindakan anggota masyarakat baik secara individual maupun kelompok yang dinilai mengganggu keteraturan dan keseimbangan hidup bermasyarakat.

## **F. PENUTUP**

Penelitian mengenai politik etnik pasca konflik Madura Dayak di

Kabupaten Kotawaringin Barat telah mencapai beberapa kesimpulan. Fenomena Konflik dan Integrasi sosial masyarakat adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan ciri-ciri fisik, pola pandang, pola pikir, kebiasaan dan adat istiadat yang dibawa setiap individu dalam masyarakat menyebabkan akan timbulnya sebuah interaksi sosial yang tak jarang pula melahirkan sebuah konflik sebagai akibat dari ketidak seimbangan pola pikir masyarakat tersebut. Konflik sempit yang telah 20 tahun berlalu meninggalkan banyak pembelajaran yang senantiasa menjadi salah satu isu strategis khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai salah satu daerah diluar Konflik, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, No 9 Tahun 2001, pasal 9 ayat 1 yang berbunyi *“Daerah Kabupaten/Kota yang tidak terlibat langsung konflik berkewajiban memelihara dan menjaga situasi tetap kondusif”*, maka berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat agar konflik serupa tidak terulang kembali. Diantaranya adalah, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kotawaringin Barat sebagai salah satu wadah penyaluran aspirasi serta mediasi konflik jika terjadi perselisihan baik menyangkut suku, ras, maupun agama.

Berbagai perubahan terjadi pasca konflik etnik Madura dan Dayak terjadi, mulai dari bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Perubahan yang terjadi tidak selalu baik, namun tidak juga selalu buruk, semua sisi mendapatkan porsinya masing-masing. Berdasarkan hasil dari wawancara serta literature review dari disertasi terdahulu, terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan oleh Peneliti, dikarenakan disertasi mengenai kondisi pasca konflik masih sedikit, maka Peneliti akan mengemukakan kesimpulan berdasarkan kondisi langsung dari masyarakat Kotawaringin Barat, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Kondisi sosial masyarakat Kotawaringin Barat pasca konflik berlangsung baik dan lebih tertata. Masyarakat yang semakin heterogen, serta kemajuan teknologi serta zaman mengakibatkan pergeseran pola pikir yang kian terbuka terhadap pendatang. Alhasil kini suku Dayak bukanlah lagi satu-satunya masyarakat mayoritas, melainkan sudah disaingi jumbahnya dengan masyarakat etnik Melayu, serta etnik Jawa yang kini dapat bermigrasi dengan mudah. Diluar suku mayoritas, Dayak, Melayu, dan Jawa, masyarakat suku Madura sendiri kedudukannya sudah jauh lebih aman.

Belajar dari masa lalu, kini masyarakat Madura tidak lagi semenemenana serta mengeksklusifkan diri seperti yang dilakukan kaumnya pada 20 tahun yang lalu. Hubungan sosial antar suku Madura dan Dayak sudah

terbilang damai, meskipun dalam beberapa kasus, masih ada oknum yang rasis terhadap suku lain selain suku dirinya namun hal tersebut bukan lagi masalah yang serius. Sebaik-baiknya hubungan keduanya kini, luka tetaplah meinumbulakn bekas, dan bekas tersebut adalah stereotip yang hingga kini masih melekat dalam kehidupan sehari-hari, Dayak yang menakutkan dan ganas, serta Madura yang semena-mena dan berantakan. Stereotip dan sentiment serupa masih tersimpan dalam diri masing-masing masyarakat dari kedua suku tersebut, sehingga jika menyangkut hubungan lintas etnik seperti pernikahan, maka pernikahan dari kedua suku Madura dan Dayak masih tabu terjadi. Namun diluar kedua suku tersebut, pernikahan lintas etnik terbilang sudah umum, seperti Jawa-Dayak, Dayak-Melayu, Melayu-Jawa, Dayak-Chinese, dan suku lainnya.

Ketegangan antar suku Madura dan Dayak sudah tidak ada, namun memang keduanya masih berjarang satu sama lainnya. Seperti penjelasan sebelumnya yang menjelaskan bahwa pernikahan lintas etnik Madura dan Dayak masih sangat asing dan tabu, begitu juga dengan berbagai hubungan lainnya, seperti hubungan kerja sama dagang misalnya. Sangat jarang terjadi kerja sama dari kedua suku tersebut, dikarenakan masing-masing suku Madura dan Dayak telah turun menurun menurunkan sentiment mengenai masalah keduanya. Diluar kedua suku tersebut, relasi suku

lainnya terjalin tanpa kerenggangan dan ketegangan.

Dalam bidang ekonomi, masyarakat etnik Madura lebih menguasai pasar yang kemudian diikuti etnik Jawa, dibandingkan dengan Masyarakat Dayak, dan Melayu. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Madura dan Jawa gemar bercocok tanam dan membuat lahan perkebunannya sendiri sehingga banyak pasokan sayuran serta buah-buahan yang berasal dari kerkebunan mereka. Banyak dari mereka menyuplai hasil tanamnya tersebut, banyak juga yang menjualnya secara langsung dipasar tradisional. Banyak pula dari mereka yang berjualan dipinggiran jalan membuka toko klontong dan sembako. Khusus masyarakat Dayak, Melayu, serta Jawa kebanyakan dari mereka lebih menguasai sektor industri sawit dan karet serta politik dan birokrasi pemerintah.

Dalam bidang politik, ketegangan antar etnik Madura dan Dayak masih sering terjadi. Ketegangan tersebut banyak digunakan sebagai sarana lempar isu, dan power sharing dalam proses kampanye. Presentasi etnikitas dalam birokrasi tidak setinggi seperti politik. Sistem yang kini berpacu pada teknologi menciptakan ketransparan dalam penyelenggaraan penerimaan CPNS. Diluar hal tersebut, politisasi birokrasi terjadi, namun tidak berfokus pada etnikitas melainkan pada dinastisasi serta politik balas budi antar pejabat setempat.

Saran yang dapat diberikan oleh Peneliti kepada peneliti lainnya mengenai politik etnik terkait konflik antar etnik antara lain adalah hendaknya lebih menggali kembali mengenai politik identitas dalam isu black campaign serta over power sharing ketika masa Pemilu maupun Pilkada berlangsung di Kabupaten/Kota yang memang identik dengan isu etnikitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah S, Ubed, 2002, Politik Identitas Etnik; Pergulatan Tanda Tanpa Identitas, Indonesiatera, Magelang.
- Abdullah Idi. 2011. Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat dan Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers
- Amstrong, M.Jocelyn, 1986, Ethnicity and Ethnic Relations in Malaysia, Center for SoutheastAsian Studies, NIU.
- Aragon, L.V., 2000, TheColonial Introductionof Religion and Language as Ethnicity in Sulawesi, Indonesia, University of HawaiiPress, Honolulu.
- Bashori, K. (2012). Dinamika Konflik dan Integrasi Antara Etnik Dayak dan Etnik Madura (Stud Kasus d Yogyakarta Malang dan Sampit). 65-76.
- Dr. Sri Astuti Buchari, M. (2014). *Kebangkitan Etnik Menuju Politik Identitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Eriksen, Thomas Hilland, 1993, Ethnicity and Nationalism (anthropological perspective) Pluto Press, London
- Fajar, D. P. (2016). *Teori-Teori Komunikasi Konflik: Upaya Memahami*

- Memetakan Konflik*. Universitas Brawijaya Press.
- H. Fimier Liadi, D. E. (2020). *POLITIK IDENTITAS PADA PILKADA KALIMANTAN TENGAH: Tatapan Mata Warga Bakumpai terhadap Pilkada Kalimantan Tengah*. Airlangga University Press.
- Horowitz, Donald L., 1981, *Ethnic Group in Conflict*, University of California Press, California.
- Horowitz, Jeremy dan James D. Long, 2006, *Democratic Survival in Multi-etnik Countries*, Working Paper, Department of Political Science, University of California, California.
- Isaacs, Harold R., 1993, *Pemujaan terhadap Kelompok Etnik (Identitas Kelompok dan Perubahan Politik)*, Terjemahan Canisyus Maran, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Khaira alfatih, *Faktor pendorong dan penghambat proses integrasi*” (on-line), tersedia di: <http://khairaalfatih.blogspot.co.id/2015/12/faktor-pendorong-dan-penghambat.html> (12 Desember 2015).
- Klinken, G. v. (2007). *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunikasi dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: yayasan Pustaka Obor Jakarta.
- Liliweri, Alo, 2007, *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*, LKiS, Jogjakarta.
- Liliweri, Alo, 2005, *Prasangka dan Konflik*, LKiS, Jogjakarta.
- Maunati, Yekti, 2004, *Identitas Dayak (Komodifikasi dan Politik Kebudayaan)* LKiS, Yog-yakarta.
- M.C. Ricklefs. 2007. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. p.35
- Mulyana, Deddy, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nimmo, Dan, 2005, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nordholt, Henk Schulte, Klinken, Gerry Van dan Ireen Karang-Hoogenboom (editor), 2007, *Politik Lokal Indonesia*, KITLV– YOI, Jakarta.
- Nordholt, Henk Schutle (ed), 2005, *Outward Appearances: Trend, Identitas dan Kepentingan*, (diterjemahkan M. ImamAzis), LKiS - KITLV, Yogyakarta.
- Peter Harris dan Ben Reilly (ed) *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, (diterjemahkan oleh LP4M), Cetakan pertama, 2000, AMEEMPRO.
- Posner, Daniel N., 2005, *Institution and Ethnic Politics in Africa*, Cambridge University Press, New York.
- Suryadinata, Leo, dkk., 2003, *Penduduk Indonesia : Etnik dan Agama dalam Era Perubahan Politik*, LP3ES.
- Rirtosudiro, Riwanto, 2007, *Mencari Indonesia; Demografi-Politik Pasca-Soeharto*, LIPI –YOI, Jakarta.
- Nooteboom, g. (2015). *Experiences of Violence*. *JSTOR*, 232-260.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2001 *Tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik* . (n.d.).
- Ruslikan. (2001). *Konflik Dayak Madura Di Kalimantan Tengah : Melacak Akar Masalah dan Tawaran Solusi*. 1-12.
- Smith, H. B. (2006). *Of Spontaneity and Conspiracy Theories : Explaining*

Violence in Central Kalimantan.  
*Jstore*, 476-491.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

Suryana & Rusdiana, 2015. Pendidikan Multikultural (suatu upaya penguatan jati diri

bangsa) Bandung: Pustaka Setia

Suharno. (n.d.). Kebijakan Peraturan Daerah Berbasis Politik Rekognisi da Resolusi Konflik Etnik. 1-11.

Susan, N. (2019). *Sosiologi Konflik: Teori-teori dan Analisis*. Kencana.

Tanasaldy, T. (2012). Ethnic Conflict and Politics. *JSTOR*, 209-234

Warnaen, Suwarsih, 2002, Stereotipe Etnik dalam Masyarakat Multietnik, Mata

Bangsa, Yogyakarta.

### ***Undang – undang***

Republik Indonesia Tahun 2001.  
*Peraturan Daerah (PERDA) No. 9 Tahun 2001 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik.*

### ***Website***

"Indonesia flashpoints: Kalimantan".  
*BBC. June 28, 2004. Diakses tanggal*

2021-09